Pemerintah Kota Pasuruan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

LKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Jalan Pahlawan No. 28A

disperindag.pasuruankota.go.id

(0343) 424919

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kami panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LKjIP adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. LKjIP disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dijalankan, sehingga di masa mendatang kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan di Kota Pasuruan. Selain itu, LKjIP ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat upaya Pemerintah Kota Pasuruan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government).

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Pasuruan, 25 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN

YUDHI HARNENDRO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199403 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran kinerja berbasis hasil. Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas tujuan dan sasaran strategis melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja serta analisis atas faktor pendukung dan penghambatnya.

Pada Tahun 2025, tujuan perangkat daerah diarahkan pada “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan” yang diukur melalui indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan terealisasi sebesar Rp1.370,11 Milyar dari target Rp1.350 Milyar, dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan terealisasi sebesar Rp2.127,11 Milyar dari target Rp2.100 Milyar. Dengan demikian, indikator tujuan tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan perkembangan sektor industri pengolahan dan perdagangan sebagai sektor unggulan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas ekonomi daerah dan pelaksanaan program pembangunan sektor terkait.

Pada tingkat sasaran strategis, capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal. Sasaran “Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian” dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri ditargetkan sebesar 0,15% dan terealisasi sebesar 0,58%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Demikian pula pada sasaran “Meningkatnya Omset Perdagangan”, indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan ditargetkan sebesar 0,01% dan terealisasi sebesar 1,27%, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kinerja sektor industri dan perdagangan daerah.

Keberhasilan pada tingkat sasaran didukung oleh pelaksanaan berbagai program, antara lain pembinaan dan pendampingan IKM, pelatihan desain kemasan, fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan, pengembangan sarana distribusi perdagangan, serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Program-program tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai produksi dan omset produk unggulan.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 meliputi fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, keterbatasan sarana dan prasarana pasar rakyat, belum optimalnya digitalisasi pengelolaan pasar, serta keterbatasan regulasi dan pelaporan data usaha tertentu. Selain itu, indikator tujuan yang berbasis data makro PDRB sangat bergantung pada ketersediaan data resmi,

sehingga waktu pengukuran kinerja tidak sepenuhnya berada dalam kendali perangkat daerah.

Sebagai upaya perbaikan, perangkat daerah telah melaksanakan langkah-langkah strategis berupa penguatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, optimalisasi promosi berbasis media dan partisipasi pameran, revitalisasi pasar rakyat, peningkatan pengawasan dan stabilisasi harga, serta penguatan sistem pelaporan dan pengelolaan data kinerja. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga konsistensi capaian sasaran serta mendorong kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap peningkatan PDRB daerah.

Secara keseluruhan, meskipun capaian indikator tujuan belum dapat diukur secara kuantitatif, kinerja pada tingkat sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang efektif dan akuntabel. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 2
1.2.1 Isu Strategis 2
1.2.2 Dukungan SDM 5
1.2.3 Sarana Prasarana 8
1.2.4 Anggaran 9
1.3 Dasar Hukum 9
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 11
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Perangkat Daerah 13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 21
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
3.1 Capaian Kinerja 34
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 34
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 35
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 37
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 39
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 40
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 41
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 45
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 46
3.2 Realisasi Anggaran 51
3.3 Inovasi 53

BAB IV PENUTUP 56
4.1 Kesimpulan 56
4.2 Rekomendasi 57
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Status Kepegawaian 6

Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Golongan 6

Tabel 1.3 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan 6

Tabel 1.4 Klasifikasi PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan 7

Tabel 1.5 Klasifikasi PPPK Paruh Waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan 7

Tabel 1.6 Sumber Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 9

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Rencana Strategis 13

Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Rencana Strategis 15

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 17

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 19

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 20

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 21

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 21

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 27

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 28

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 34

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35

Tabel 3.2.1 Total Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2024 dan 2025 36

Tabel 3.2.2 Total Nilai Omset Produk Unggulan Tahun 2024 dan 2025 36

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 37

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 39

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi 40

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 41

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 45

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 46

Tabel 3.9 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....5

Gambar 3.1 Screenshot katalog digital Kipaskopas.com.....54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome). Melalui penerapan SAKIP, setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu sistem yang terpadu dan akuntabel.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, yang membawa penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk perubahan indikator kinerja tujuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Perubahan tersebut menuntut konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan sektor industri dan perdagangan, tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penguatan tata kelola pasar rakyat, serta peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga. Oleh karena itu, pengukuran kinerja Tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran strategis yang mendukung peningkatan nilai produksi sektor industri dan peningkatan omset perdagangan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas tersebut direalisasikan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, serta pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi SAKIP secara menyeluruh.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

1. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2. Harga bahan pokok yang fluktuatif
3. Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Permasalahan Utama pada Bidang Perindustrian meliputi :

1. Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
2. Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan (regenerasi yang minim);
3. Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
4. Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman;
5. Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang; dan
6. Masih banyak IKM yang belum memahami tata cara pengurusan dan pelaporan SIINas.

Untuk permasalahan utama pada Bidang Perdagangan meliputi:

1. Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar).
3. Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-import untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan.
5. Harga kebutuhan bahan pangan pokok yang bersifat fluktuatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Nataru.
6. Kurangnya minat masyarakat dalam pemakaian produk dalam negeri.
7. Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan.
8. Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan

Selanjutnya, permasalahan utama pada Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat meliputi:

1. Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya perbaikan dan pemeliharaan.
2. Manajemen pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan perlu dibenahi.
3. Belum adanya digitalisasi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar.
4. Pelaksanaan dan penerapan e-retribusi yang masih terkendala dengan kualitas SDM pedagang pasar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas, Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

a. Sekretariat, membawahkan:
   1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

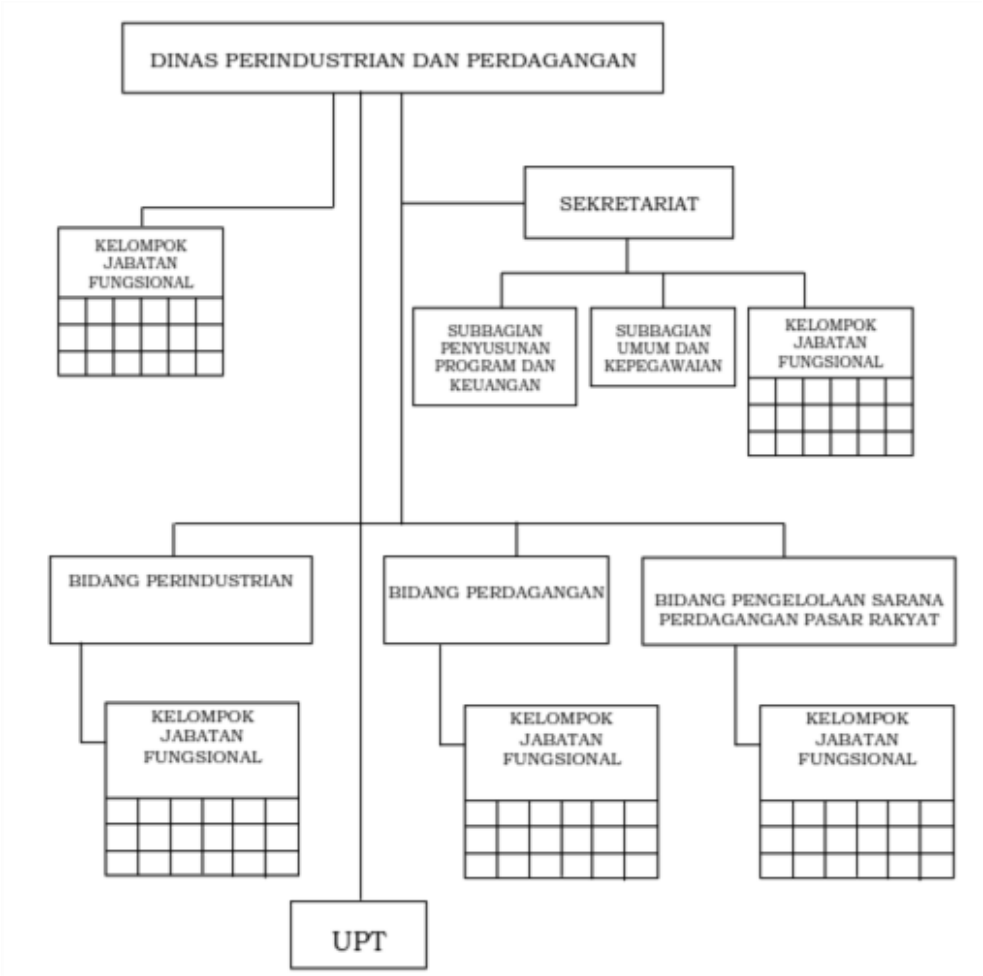
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. kelompok Jabatan Fungsional;

b. Bidang Perindustrian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Perdagangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
e. UPT; dan
f. kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat r;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan sarana perdagangan pasar rakyat;
f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
g. Pembinaan terhadap UPT; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Walikota No. 48 Tahun 2025 tentang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas:



Gambar 1.1 Bagan Alur Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan (sumber: Peraturan Walikota No.48 Tahun 2025)

1.2.2 Dukungan SDM

Dalam menunjang ketercapaian kinerja program/kegiatan dan kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan didukung oleh SDM yang terdiri atas:

- 52 (Lima Puluh Dua) orang PNS
- 12 (Dua Belas) orang PPPK
- 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang PPPK Paruh Waktu

Adapun komposisi klasifikasi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Klasifikasi ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	36	16	52
2	PPPK	7	5	12
3	PPPK Paruh Waktu	104	27	131
	Jumlah	147	43	195

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.2 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	-	1	1
2.	Golongan III	16	10	26
3.	Golongan II	20	5	25
4.	Golongan I	1	-	1
	Jumlah	36	16	52

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.3 Klasifikasi PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	3	3	6
3.	Strata 1	9	4	13
4.	Diploma 3	5	2	7
5.	Diploma 1	-	-	-
6.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	16	7	23
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	3	-	3
	Jumlah	36	16	52

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.4 Klasifikasi PPPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	4	5	9
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	-	-
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	-
7	Sekolah Dasar	2	-	-
	Jumlah	7	5	12

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Tabel 1.5 Klasifikasi PPPK Paruh Waktu Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	-	-	-
2.	Strata 1	5	7	12
3.	Diploma 3	-	1	1
4.	Diploma 1	-	-	-
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	27	15	42
6.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4	-	4
7.	Sekolah Dasar	72	4	76
	Jumlah	104	27	131

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

Sampai dengan Tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu dengan komposisi terbesar berada pada kategori PPPK Paruh Waktu yang sebagian besar bertugas pada pengelolaan pasar rakyat.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan operasional pelayanan pasar relatif memadai. Namun demikian, pada fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja masih bertumpu pada jumlah aparatur struktural dan fungsional tertentu

yang terbatas. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya penguatan manajemen kinerja dan peningkatan kualitas pelaporan.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar pegawai telah memenuhi standar kompetensi jabatan, sehingga secara umum sumber daya manusia dinilai cukup mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2.3 Sarana Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan operasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berlokasi di Kompleks Perkantoran Walikota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28A, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Struktur organisasi dinas ini terdiri atas tiga bidang, yaitu Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat, serta tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT Metrologi Legal, UPT Industri Logam, dan UPT Pasar. Adapun UPT Metrologi Legal dan UPT Industri Logam beralamat di Jalan Hangtuah Nomor 29, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, sedangkan UPT Pasar berkedudukan di masing-masing Pasar Rakyat, yaitu Pasar Besar, Pasar Kebonagung, Pasar Gadingrejo, Pasar Karangketug, Pasar Bukir, dan Pasar Poncol.

Masing-masing bidang dan unit pelaksana teknis memiliki kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Secara umum, sarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional meliputi meja, kursi, lemari arsip, komputer (PC), dan laptop. Selain itu, terdapat pula sarana khusus sesuai dengan karakteristik kegiatan pada masing-masing unit kerja. Bidang Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat memiliki tambahan aset berupa tenda yang digunakan dalam kegiatan Operasi Pasar, Pasar Murah, Pameran Dagang, dan kegiatan sejenis lainnya. UPT Metrologi Legal memiliki berbagai jenis alat ukur yang digunakan dalam kegiatan tera dan tera ulang. UPT Industri Logam memiliki aset berupa alat coating untuk pelayanan pelapisan berbagai jenis logam, sedangkan UPT Pasar memiliki beberapa kendaraan operasional, seperti truk sampah, gerobak sampah, dan kendaraan roda tiga, yang digunakan untuk mendukung kegiatan kebersihan dan operasional pasar rakyat.

1.2.4 Anggaran

Pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 didukung dengan anggaran yang bersumber pada APBD, BKK Provinsi Jawa Timur, dan DBH-CHT. Berikut perbandingan pagu anggaran pada Tahun 2024 dan Tahun 2025:

Tabel 1.6 Sumber Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Sumber	Tahun	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	16.910.569.650
DAK non-Fisik		1.972.760.000
APBD	2025	18.189.552.815
BKK Provinsi Jawa Timur		6.705.152.790
DBH-CHT		275.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiuran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas; dan
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issues)* yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tahun 2025
3. Matriks Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029
4. Lain-lain yang dianggap perlu

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 oleh Inspektorat Kota Pasuruan Nomor: 700.1.2.1/628/423.300/LHE/2025 Tanggal 15 Agustus 2025, SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah memenuhi seluruh aspek penilaian komponen dan sub komponen akuntabilitas. Adapun tindak lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2025 antara lain:

1. Menyampaikan LKjIP kepada Wali Kota sesuai ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Menjelaskan secara memadai pada dokumen rencana kinerja perangkat daerah atas perubahan target kinerja.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja.
4. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah

1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah melaksanakan beberapa langkah perbaikan secara terencana antara lain:

1. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, termasuk pemenuhan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pendukung;
2. Penguatan dokumen rencana kinerja dengan menjelaskan secara memadai setiap perubahan target kinerja yang terjadi, baik dalam Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, maupun LKjIP.

3. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sistem informasi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga data kinerja menjadi lebih akurat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.
4. Melaksanakan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan secara mandiri. Tindak lanjut ini dilakukan melalui inventarisasi rekomendasi, penyusunan matriks tindak lanjut, pelaksanaan perbaikan sesuai rekomendasi, serta pemantauan dan pendokumentasian hasil tindak lanjut secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Perangkat Daerah

Penyajian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya dimaksudkan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode pelaporan, serta untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut Tujuan dan Sasaran berserta Indikator pada Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang dituangkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian dan kategori Perdagangan			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian	0,264	-	-	-	-	-
				Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	0,253	-	-	-	-	-
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,5	-	-	-	-	-
		1.2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	1	-	-	-	-	-
				Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pasar	79,9	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	-	49,00	49,05	49,10	49,15	49,20
		2.1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		2.2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	-	1	1	1	1	1

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan, sehingga dilakukan penyelarasan kembali atas kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan penyesuaian RPJMD dimaksud, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah juga dilakukan penyesuaian guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyesuaian ini dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang normatif dan terstruktur sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran.

Menindaklanjuti penyesuaian dokumen perencanaan daerah dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan mengacu pada Pohon Kinerja Kota Pasuruan terbaru. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan perumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran, sebagai bentuk penyelarasan antara mandat Perangkat Daerah dengan sasaran strategis pembangunan daerah.

Sebagai implikasi dari penyesuaian tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengalami perubahan, khususnya pada indikator kinerja tujuan, sedangkan indikator kinerja sasaran tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menyebabkan keterbandingan indikator kinerja tujuan antar periode RPJMD menjadi terbatas, namun dengan tetap terjaganya konsistensi indikator kinerja sasaran, kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tetap dapat dilakukan secara objektif dan akuntabel. Tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Bab IV Dokumen Renstra 2025-2029, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1350	1400	1450	1500	1550	1600
				Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	2100	2200	2300	2400	2500	2600
		1.1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri (%)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		1.2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan (%)	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Periode 2025-2029

Agar dapat berfungsi secara optimal dalam mengukur kinerja perangkat daerah, indikator kinerja yang ditetapkan harus memenuhi unsur **SMART**, yaitu:

1. *Spesifik*

   Indikator kinerja harus bersifat khusus sesuai dengan objek yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. *Measurable*

   Indikator kinerja yang ditetapkan harus mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional
3. *Achievable*

   Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi
4. *Relevant*

   Indikator kinerja terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi
5. *Time Bond*

   Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dengan memenuhi kelima unsur tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat menjadi alat ukur yang andal dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 pada awalnya disusun berdasarkan RPJMD 2021-2026. IKU tersebut dirumuskan untuk menggambarkan kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah, khususnya melalui peningkatan produksi dan omset penjualan yang bermuara pada peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perindustrian dan perdagangan. Adapun susunan IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 sesuai RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra PD Periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Tujuan:** Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1.1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	%	Jumlah Persentase Kontribusi PDRB Kategori Perindustrian ditambahkan dengan Persentase Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan	$\%\ Kontribusi\ PDRB\ Kategori\ Perindustrian\ +\ \%\ Kontribusi\ PDRB\ Kategori\ Perdagangan$	Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan
2	**Sasaran I:** Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	2.1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	Persentase dari selisih Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n) terhadap Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n-1) dibagi dengan Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n-1)	$\frac{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ n - \sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)} x100\%$	Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
3	**Sasaran II:** Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	3.1	Persentase Peningkatan Omset	%	Persentase dari selisih Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n) terhadap Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n-1) dibagi dengan Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n-1)	$\frac{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ \ Unggulan\ Th\ n - \sum Omset\ Penjualan\ Produk\ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ \ Unggulan\ Th\ (n-1)} x100\%$	Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD 2025-2029 Kota Pasuruan, diperlukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang terbaru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperjelas kontribusi kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, serta memperkuat keterukuran indikator kinerja yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada IKU setelah penyesuaian, tujuan kinerja diarahkan secara lebih spesifik pada peningkatan nilai PDRB sektor unggulan, dengan memisahkan indikator sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Perubahan ini dimaksudkan agar pengukuran kinerja dapat menggambarkan secara lebih nyata dampak pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Susunan IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 setelah penyesuaian RPJMD dan Renstra PD 2025-2029 disajikan pada Tabel 2.2.2.

Selain itu, penyesuaian juga dilakukan pada sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Sasaran strategis pada sektor perindustrian difokuskan pada peningkatan nilai produksi sektor industri, sedangkan pada sektor perdagangan diarahkan pada peningkatan nilai omset penjualan. Penyesuaian tersebut diselaraskan dengan dokumen Pohon Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menggambarkan keterkaitan kinerja secara berjenjang antara sasaran strategis dan tujuan perangkat daerah, serta outcome yang diharapkan. Dengan penyelarasan ini, perumusan sasaran dan indikator kinerja mencerminkan alur pencapaian kinerja yang logis dan konsisten, sehingga arah upaya pencapaian kinerja dapat dipahami secara jelas dan terukur.

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Tujuan:** Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1.1	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan sektor industri pengolahan, yang dihitung menggunakan harga-harga pada tahun dasar 2010, sehingga tidak dipengaruhi oleh perubahan harga/inflasi maupun deflasi (dalam Milyar)	$Berdasarkan\ perhitungan\ BPS$	Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan
		1.2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan sektor perdagangan yang dihitung menggunakan harga-harga pada tahun dasar 2010, sehingga tidak dipengaruhi oleh perubahan harga/inflasi maupun deflasi (dalam Milyar)	$Berdasarkan\ perhitungan\ BPS$	Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan
2	**Sasaran I:** Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	2.1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	Besaran persentase perubahan nilai produksi sektor industri yang diperoleh dari data pelaporan pelaku IKM melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibandingkan dengan periode sebelumnya	$\frac{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ n - \sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Nilai\ Produksi\ Sektor\ Unggulan\ Th\ (n-1)} x100\%$	Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
3	**Sasaran II:** Meningkatnya Omset Perdagangan	3.1	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	%	Besaran persentase perubahan nilai omset penjualan yang diperoleh dari hasil survei IKM sektor unggulan yang dibina dibandingkan dengan periode sebelumnya	$\frac{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ \ Unggulan\ Th\ n - \sum Omset\ Penjualan\ Produk\ Unggulan\ Th\ (n-1)}{\sum Omset\ Penjualan\ Produk\ \ Unggulan\ Th\ (n-1)} x100\%$	Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 telah menyesuaikan dengan target indikator tujuan dan sasaran (IKU) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Berikut uraian tujuan dan sasaran beserta indikator selaras dengan Renja Perubahan Tahun 2025 yang dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	1350
				Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	2100
		1.1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0,15
		1.2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	%	0,01

Sumber: Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menetapkan tujuan kinerja meningkatnya PDRB sektor unggulan yang difokuskan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Target Nilai PDRB sektor industri pengolahan ditetapkan sebesar Rp1.350 Milyar, sedangkan sektor perdagangan sebesar Rp2.100 Milyar. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran kinerja, yaitu meningkatnya produksi sektor perindustrian dan meningkatnya omset perdagangan. Masing-masing sasaran diukur melalui indikator persentase peningkatan nilai produksi sektor industri dengan target 0,15% dan persentase peningkatan nilai omset penjualan dengan target 0,01%. Penetapan sasaran dan indikator kinerja ini dimaksudkan untuk memastikan fokus kinerja perangkat daerah pada hasil yang terukur serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun indikator kinerja utama untuk sasaran strategis dituangkan ke dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Berikut perjanjian kinerja oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,10 %
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	1,00 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Program		Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.653.421.959
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 27.837.000
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 11.968.945.960
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 121.174.950
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 107.862.900
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 804.757.651

Dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	98%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	68 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	40 Paket
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
	Sub Kegiatan: Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	98%
	Sub Kegiatan: Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAANf	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 %
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	16 Peserta
	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	2 Laporan
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	100%
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	33,33 %
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Pedagang yang Dibina	13,77 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10 %
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	10 %
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	11,0 %
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang	1 Laporan

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit
	Sub Kegiatan: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 Orang
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5 %
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM Berkembang	30 %
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Industri	2 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	15.008.200
2	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	10.974.200
3	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4.034.000
4	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.570.768.059
5	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.514.258.959
6	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp	56.509.100
7	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	8.634.800
8	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	8.634.800
9	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	126.332.400
10	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.434.400

11	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	10.000.000
12	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	2.000.000
13	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	110.898.000
14	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	770.228.500
15	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	123.328.000
16	Sub Kegiatan: Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	646.900.500
17	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	162.450.000
18	Sub Kegiatan: Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	103.700.000
19	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	7.000.000
20	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	17.750.000
21	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	34.000.000
22	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	27.837.000
23	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp	27.837.000
24	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	8.251.413.460
25	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	7.426.034.300
26	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	825.379.160
27	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp	3.717.532.500
28	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	21.264.600
29	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	3.696.267.900
30	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota	Rp	121.174.950
31	Sub Kegiatan:	Rp	121.174.950

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
32	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp	107.862.900
33	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp	97.787.800
34	Sub Kegiatan: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp	10.075.100
35	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp	804.757.651
36	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp	93.245.900
37	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp	123.451.000
38	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp	175.000.000
39	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp	413.060.751

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mengalami beberapa penyesuaian yang bersifat strategis, baik dari aspek perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional serta dinamika perencanaan pembangunan daerah. Pada bulan Maret Tahun 2025, Pemerintah Pusat menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga memunculkan kebijakan peninjauan dan pengurangan anggaran pada beberapa instansi dan program. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melakukan realokasi sumber daya ke program-program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah Kota Pasuruan menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Walikota Pasuruan tanggal 3 Maret 2025 Nomor: 903.1.1.4/276/423.201/2025 Perihal Rencana Pergeseran Anggaran sebagai dasar pelaksanaan penyesuaian program dan kegiatan pada perangkat daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan melakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja terhadap pagu anggaran hasil efisiensi. Meskipun terjadi perubahan dalam besaran alokasi anggaran, namun target kinerja yang telah ditetapkan tidak mengalami perubahan, sehingga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat terjaga.

Selain itu, dilakukan kembali penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja pada Bulan September. Penyesuaian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2025-2029, sekaligus Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2025. Ketiganya menjadi dasar bagi peninjauan kembali sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta indikator kinerja kegiatan (IKK) agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, serta akuntabel. Upaya optimalisasi capaian kinerja tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai berikut.

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,15 %	0,15 %
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	0,01 %	0,01 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Program	Anggaran			
	Sebelum		Sesudah	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.506.850.959,00	Rp	8.703.524.524,00
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	8.697.000,00	Rp	54.297.000,00
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	13.363.504.500,00	Rp	15.035.426.640,00
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	112.298.250,00	Rp	602.897.950,00
5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	73.999.800,00	Rp	73.999.800,00
6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	697.559.691,00	Rp	699.559.691,00

Dengan rincian perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	98%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	68 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	98%
	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	98%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	40 Paket
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	98%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
	Sub Kegiatan: Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	98%
	Sub Kegiatan: Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAANf	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 %
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	16 Peserta
	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	2 Laporan
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar	80 %
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	50 %
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Perdagangan yang Dibina	11,31 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen

No	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata - rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok	10 %
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10 %	10 %
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang telah ditera dan Tera ulang	11,0 %
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang	1 Laporan
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5 %
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM Berkembang	30 %
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen

Sumber: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	9.458.800
2	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	9.458.800
3	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	7.667.188.124
4	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.612.116.724

5	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp	55.071.400
6	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	8.397.400
7	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	8.397.400
8	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	107.046.400
9	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	1.484.400
10	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Material	Rp	5.000.000
11	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	1.300.000
12	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	99.262.000
13	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.953.900
14	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	4.953.900
15	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	757.183.900
16	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	123.328.000
17	Sub Kegiatan: Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	633.855.900
18	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	149.296.000
19	Sub Kegiatan: Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	98.160.000
20	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	7.000.000
21	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	10.136.000
22	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	34.000.000
23	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	54.297.000
24	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Rp	54.297.000
25	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	11.170.561.940

26	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	10.123.298.940
27	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.047.263.000
28	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp	3.864.864.700
29	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	88.172.500
30	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	3.776.692.200
31	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota	Rp	602.897.950
32	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp	602.897.950
33	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp	73.999.800
34	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp	73.999.800
35	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp	699.559.691
36	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp	79.249.000
37	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp	82.552.400
38	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp	175.000.000
39	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp	362.758.291

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian program/kerja maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mempermudah pelaporan kinerja, antara lain:

1. SiRUP

   SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, penetapan cara pengadan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa dan anggaran pengadaan.

2. Siskaperbapo

   Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) adalah aplikasi dan situs web resmi dari Pemprov Jatim yang menyediakan data harian terkini mengenai harga dan ketersediaan bahan pokok serta barang penting lainnya. Sistem ini memantau 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara real-time untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah memantau stabilitas harga.

3. SIINas

   SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah platform digital yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi merupakan proses yang dilakukan dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara tingkat kinerja yang dicapai dengan target indikator kinerja utama (IKU) yang telah dirumuskan sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja dapat diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Melalui hasil pengukuran tersebut, diperoleh informasi mengenai tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, setiap program atau kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, serta memberikan hasil yang optimal bagi pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, pengukuran kinerja juga bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pihak internal maupun eksternal mengenai tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan misi yang diemban. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya menggambarkan tingkat capaian indikator kinerja utama (IKU) terhadap target dan realisasinya.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memiliki 1 (satu) Tujuan yakni “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan” yang didukung oleh 2 (dua) sasaran startegis/pembangunan. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ditunjukkan oleh Tabel 3.2 sebagaii berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,15%	0,58%	100	Sangat Tinggi	Bidang Perindustrian
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	0,01%	1,27%	100	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian” dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator “Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri” pada Tahun Pelaporan 2025. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai produksi sektor industri unggulan di Kota Pasuruan.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, persentase peningkatan nilai produksi sektor industri ditargetkan sebesar 0,15%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai berdasarkan data yang bersumber dari aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tercatat sebesar 0,58% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Hasil perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi.

Nilai produksi sektor industri yang menjadi dasar penghitungan indikator tersebut diklasifikasikan berdasarkan produk unggulan Kota Pasuruan. Klasifikasi industri produk unggulan dan nilai produksi tahun 2024 dan 2025 ditunjukkan pada Tabel 3.2.1 di bawah ini:

Tabel 3.2.1 Total Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2024 dan 2025

Klasifikasi Industri Sektor Unggulan		Nilai Produksi (Rp)	
		2024	2025
1	Industri Tekstil	7.881.050.000	7.860.850.000
2	Industri Kayu dan Olahannya	92.965.330.750	93.857.158.342
3	Industri Logam	43.673.856.519	43.644.656.519
Total		**144.520.237.269**	**145.362.664.861**

Sumber: Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Capaian kinerja tersebut menjadi indikator positif atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendorong peningkatan produksi sektor industri. Hasil pengukuran ini selanjutnya menjadi dasar evaluasi untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan peningkatan kinerja melalui penguatan pembinaan dan pemberdayaan IKM, peningkatan kualitas dan kelengkapan data pelaporan melalui SIINas, serta optimalisasi dukungan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Omset Perdagangan

Pada sasaran kedua dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan” diperlukan data Omset Produk Unggulan yang terdiri atas Produk Olahan Kayu, Logam dan Olahan Kain. Data Nilai Omset Produk Sektor Unggulan pada tahun 2024 dan 2025 ditunjukkan oleh Tabel 3.2.2 berikut ini:

Tabel 3.2.2 Total Nilai Omset Produk Unggulan Tahun 2024 dan 2025

Klasifikasi Produk Unggulan		Jumlah (Rupiah)	
		2024	2025
1	Produk Olahan Kayu	22.908.000.000	23.201.222.000
2	Produk Logam	20.891.900.000	21.159.316.000
3	Produk Olahan Kain	565.200.000	572.435.000
Jumlah Total		**44.365.100.000**	**44.932.973.000**

Sumber: Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Berdasarkan Tabel 3.2.2, total nilai omzet produk unggulan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, dari Rp44.365.100.000 menjadi Rp44.932.973.000, yang menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja penjualan produk unggulan daerah. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya nilai omzet pada seluruh klasifikasi produk, dengan kontribusi terbesar berasal dari produk olahan kayu yang meningkat dari Rp22.908.000.000 menjadi Rp23.201.222.000, diikuti oleh produk logam

yang naik dari Rp20.891.900.000 menjadi Rp21.159.316.000, serta produk olahan kain yang meskipun bernilai relatif kecil tetap menunjukkan tren positif dari Rp565.200.000 menjadi Rp572.435.000. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan kinerja sektor produk unggulan yang stabil dan berkontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai omzet penjualan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan:** Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan *(lama)*	49,79%	49,30%	-	-	
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan *(baru)*	1263,99	1308,54	1350	1370,11	100
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan *(baru)*	1909,93	2007,21	2100	2127,11	100
2	**Sasaran 1:** Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,24%	0,15%	0,15%	0,58%	100
3	**Sasaran 2:** Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	9,91%	25,19%	0,01%	1,27%	100

Sumber: Pasuruan Dalam Angka 2026
LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2023 – 2025
LHE Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 2023-2025

Pada tujuan Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya perubahan indikator kinerja yang disebabkan oleh transisi dokumen perencanaan daerah. Indikator persentase

kontribusi PDRB sektor unggulan yang digunakan pada tahun 2023–2024 merupakan indikator yang bersumber dari RPJMD periode sebelumnya, yaitu RPJMD 2021–2026. Seiring dengan ditetapkannya RPJMD baru periode 2025–2029, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian indikator kinerja tujuan menjadi Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan, guna memberikan pengukuran yang lebih spesifik terhadap kinerja sektor unggulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 1.370,11 milyar dari target sebesar 1.350 milyar dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan terealisasi sebesar 2.127,11 milyar dari target sebesar 2.100 milyar, sehingga kedua indikator mencapai capaian sebesar 100% dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator tersebut merupakan hasil kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan secara umum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan peran lintas sektor. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mendukung peningkatan kinerja sektor tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti pembinaan dan pendampingan industri, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan sektor perdagangan. Kontribusi tersebut bersifat mendukung terhadap kinerja sektor, dan selaras dengan upaya pencapaian tujuan perangkat daerah.

Pada sasaran Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri, capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,24% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,15%. Pada tahun 2025, realisasi indikator meningkat menjadi 0,58%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,15%, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja produksi sektor perindustrian dibandingkan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Omset Perdagangan dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan, capaian kinerja tahun 2023 tercatat sebesar 9,91% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 25,19%. Pada tahun 2025, realisasi indikator sebesar 1,27% dengan target 0,01%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2025, realisasi indikator menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja sektor perdagangan tetap terjaga serta pelaksanaan program dan kegiatan pendukung sasaran berjalan efektif, meskipun terdapat perbedaan dinamika pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2030 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	**Tujuan:** Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	1370,11	1600	85,63%
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2127,11	2600	81,82%
2	**Sasaran 1:** Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,58%	0,15%	386,67%
3	**Sasaran 2:** Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	1,27%	0,05%	2540%

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Periode 2025-2029

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2025, tujuan “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan” diukur melalui indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.370,11 atau mencapai 85,63% dari target akhir Rencana Strategis sebesar 1.600. Sementara itu, Nilai PDRB Sektor Perdagangan terealisasi sebesar 2.127,11 atau mencapai 81,82% dari target akhir Rencana Strategis sebesar 2.600.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan telah mengalami perkembangan yang positif dan berada pada jalur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Meskipun belum mencapai target akhir periode Rencana Strategis, tingkat kemajuan yang telah dicapai hingga tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik dan memberikan dasar yang kuat bagi pencapaian target pada tahun-tahun berikutnya.

Berbeda dengan indikator kinerja pada tingkat tujuan, indikator kinerja sasaran ditetapkan dengan nilai target yang sama selama periode Rencana Strategis hingga tahun 2030. Hal ini disebabkan indikator kinerja sasaran merupakan persentase

peningkatan hasil kinerja pada tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1), sehingga tidak bersifat kumulatif antar-tahun. Oleh karena itu, apabila realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2030, maka tingkat kemajuan yang diperoleh dapat melebihi 100% dan pada prinsipnya setara dengan nilai capaian kinerja pada tahun pelaporan.

Pada Sasaran 1 “Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian”, indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri menunjukkan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 0,58%, melampaui target Akhir Rencana Strategis sebesar 0,15%, dengan tingkat kemajuan mencapai 386,67%. Selanjutnya, pada Sasaran 2 “Meningkatnya Omset Perdagangan”, indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan juga menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 1,27%, jauh melampaui target Akhir Rencana Strategis sebesar 0,05%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 2540%.

Penilaian tingkat kemajuan kinerja pada kedua sasaran menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mencapai target Rencana Strategis, meskipun secara numerik realisasi kinerja melampaui target. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk penetapan target kinerja pada periode selanjutnya agar lebih proporsional dan terukur.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi Jawa Timur	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	**Tujuan:** Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	1370,11	-	
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2127,11	-	
2	**Sasaran 1:** Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,58%	-	
3	**Sasaran 2:** Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	1,27%	-	

Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan indikator tujuan yang digunakan. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan indikator yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Pada tingkat daerah, indikator yang digunakan mengacu pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010, sedangkan pada tingkat kementerian digunakan indikator laju pertumbuhan PDRB serta nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Perbedaan basis pengukuran tersebut menyebabkan indikator kinerja yang digunakan tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Selain itu, IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta karakteristik perekonomian daerah, sehingga belum seluruhnya memiliki padanan indikator yang ditetapkan secara seragam pada tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karena itu, pembandingan realisasi kinerja dengan standar nasional atau provinsi belum dapat dilakukan secara komprehensif.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tujuan/Sasaran serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tahun 2025, ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Tujuan:** Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	1350	1370,11	100	Capaian ini mencerminkan kinerja sektor industri pengolahan secara umum, yang didukung oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan industri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penguatan sektor industri.	
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2100	2127,11	100	Capaian ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas sektor perdagangan daerah yang dipengaruhi oleh	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						berbagai faktor, termasuk dukungan program fasilitasi dan pengembangan perdagangan yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja sektor perdagangan.	
2	**Sasaran 1:** Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,15%	0,58%	100	Melalui program/ kegiatan urusan perindustrian, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pelatihan desain kemasan, pendampingan digital marketing bagi IKM mebel, serta pelayanan coating pada UPT Industri Logam, serta kegiatan Dekranasda.	
3	**Sasaran 2:** Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	0,01%	1,27%	100	Keberhasilan peningkatan omset didukung oleh kegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran, meliputi promosi melalui media seperti Radio Suara Surabaya, promosi mandiri ke perusahaan dan hotel, pembagian brosur UKM, serta partisipasi dalam kegiatan promosi tingkat provinsi dan instansi lain, yang efektif memperluas akses pasar produk unggulan.	

Tujuan: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Tujuan “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan” ditetapkan untuk mengukur peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Pengukuran tujuan ini menggunakan dua indikator kinerja, yaitu Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan, yang merupakan indikator makro ekonomi dan bersumber dari data resmi Badan Pusat Statistik.

Pada Tahun 2025, target Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan ditetapkan sebesar Rp1.350 Milyar dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan sebesar Rp2.100 Milyar. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik, realisasi Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan tercatat sebesar Rp1.370,11 Milyar dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan

sebesar Rp2.127,11 Milyar. Berdasarkan data tersebut, target kinerja tujuan pada Tahun 2025 telah tercapai.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perindustrian dan perdagangan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran produk, serta penguatan daya saing industri kecil dan menengah dan pelaku usaha perdagangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan sebagai sektor unggulan daerah. Ke depan, upaya peningkatan dan penguatan sektor industri pengolahan dan perdagangan akan terus dilaksanakan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian daerah.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian beserta program, kegiatan, dan subkegiatan pendukungnya pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang baik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya indikator kinerja sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perindustrian, yang terealisasi sebesar 0,58% dari target yang ditetapkan sebesar 0,15%, sehingga capaian kinerjanya dinilai telah memenuhi target yang direncanakan.

Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan kapasitas dan proses produksi industri, antara lain melalui pelatihan desain kemasan, pendampingan digital marketing bagi IKM mebel, serta pelayanan *coating* pada UPT Industri Logam. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta peningkatan volume dan nilai produksi IKM.

Selain kegiatan yang berdampak langsung tersebut, terdapat pula kegiatan yang bersifat pendukung, seperti pelaksanaan kegiatan Dekranasda yang meliputi kunjungan industri, partisipasi dalam pameran, rapat kerja, serta penguatan kelembagaan. Kegiatan pendukung ini tidak berdampak langsung terhadap peningkatan nilai produksi, namun berperan dalam memperluas promosi, memperkuat jejaring pemasaran, dan meningkatkan eksposur produk IKM, sehingga secara tidak langsung turut mendorong peningkatan permintaan pasar dan mendukung pencapaian sasaran kinerja sektor perindustrian.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan tersebut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM), sehingga mendukung pencapaian sasaran kinerja urusan perindustrian pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyelenggaraan program/kegiatan, adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

1. Keterbatasan permodalan;
2. Konsistensi pelaku usaha dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pelatihan/pendampingan;
3. Kesiapan SDM dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan teknologi; dan
4. Kondisi perekonomian dan persaingan pasar, yang mempengaruhi stabilitas permintaan produk IKM.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan difokuskan pada penguatan pendampingan IKM yang lebih terarah dan berkelanjutan, serta penguatan sinergi kegiatan peningkatan kualitas produk dengan promosi dan pemasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha IKM, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja sektor perindustrian pada tahun berikutnya.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Omset Perdagangan

Indikator kinerja utama sasaran strategis kedua “Meningkatnya Omset Perdagangan” yaitu Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan. Pada tahun 2025, target IKU untuk Sasaran Kedua sebesar 0,01% dan realisasi sebesar 1,27%. Ketercapaian target indikator didukung oleh efektivitas strategi pemasaran sektor unggulan yaitu dengan adanya promosi mandiri, inovasi produk unggulan, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar hal tersebut yang menjadi faktor bertambahnya peningkatan omset dari tahun 2024 ke 2025.Peningkatan omset dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas produk unggulan, peningkatan skill atau kemampuan SDM dalam memasarkan produknya, dan banyaknya memanfaatkan peluang dalam proses pemasaran.

Pencapaian peningkatan omset ini diperoleh dari upaya Bidang Perdagangan, sebagai pelaksana teknis program/kegiatan urusan perdagangan, dalam melayani para pelaku usaha untuk memasarkan dan mengenalkan produk unggulan Kota Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Program dan Kegiatannya memfasilitasi para pelaku usaha dalam memasarkan produknya antara lain:

1. Melaksanakan Promosi Melalui Media (Radio Surabaya);
2. Melaksanakan Promosi Mandiri Ke Perusahaan dan Hotel di Kota Surabaya;
3. Membagikan Brosure UKM dalam Acara; dan
4. Melakukan Promosi Mandiri Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun instansi lain.

Selain itu semangat pelaku usaha sektor unggulan dalam memasarkan produk juga menjadi faktor bertambahnya peningkatan omset dari tahun 2024 ke 2025. Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

1. Banyaknya pelaku IKM yang kurang kooperatif dalam menyampaikan omsetnya; dan
2. Banyak pelaku usaha yang mengabaikan akan pelaporan keuangan usahanya

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pentingnya pelaporan keuangan serta strategi marketing yang baik dan mampu memikat *buyer*.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	0,15%	0,58%	100	699.559.691	273.768.616	39,13	Efisien (8,88)
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	0,01%	1,27%	100	24.470.145.914	15.691.218.534	64,12	Efisien (197,05)

Berdasarkan Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang memadai. Hal ini tercermin dari ketercapaian target kinerja yang optimal dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang ditetapkan.

Pada sasaran Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian, indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar 39,13% dari pagu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian output dan outcome yang direncanakan. Adapun belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya rencana aksi pada salah satu subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya Omset Perdagangan, target kinerja dapat dicapai dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 64,12% dari pagu yang dialokasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sektor perdagangan telah berjalan efektif, dengan pemanfaatan sumber daya yang selaras dengan capaian

kinerja. Belum optimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh belum dapat dilaksanakannya salah satu rencana aksi pada subkegiatan tertentu, mengingat pelaksanaannya masih menunggu penetapan kebijakan/peraturan wali kota sebagai landasan operasional.

Secara keseluruhan, ketercapaian sasaran strategis yang disertai dengan realisasi anggaran di bawah pagu mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan cukup baik. Kondisi ini mencerminkan adanya keselarasan antara target kinerja dan dukungan anggaran, serta mendukung penerapan prinsip efisiensi dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan SAKIP.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan disajikan pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	100	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	100	Menunjang	(penjelasan berada di bawah tabel)
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	100	Menunjang	
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	100	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/ Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	100	Menunjang	
				Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya san pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/ Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	100	Menunjang	
				PROGRAM PENINGKATAN	Persentase ketercapaian	100	Menunjang	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	retribusi pasar			
				Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pasar yang direvitalisasi	100	Menunjang	
				Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase PKL yang dibina	100	Menunjang	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	91,25	Menunjang	
				Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%	100	Menunjang	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang	100	Menunjang	
				Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang	100	Menunjang	

Sumber: Monev Tribulan IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Sasaran strategis yang pertama, Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian, didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dimana realisasi kinerja, baik program maupun kegiatan telah memenuhi/melebihi target indikator.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian” didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diukur dengan indikator yaitu Persentase Peningkatan IKM berkembang. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 24,72% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah IKM yang

berkembang pada tahun 2025 mencapai 111 IKM, dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 89 IKM. Ketercapaian target indikator pada tahun ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi Industri Kecil Menengah Tahun 2025.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase IKM berkembang dengan target sebesar 30,00% dan realisasi sebesar 73,33%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data jumlah IKM yang berkembang selama kurun waktu tahun 2025 sebanyak 22 IKM dari jumlah IKM yang dilatih sebanyak 30 IKM. Ketercapaian target indikator didukung dari pelatihan yang memberikan wawasan/pengetahuan untuk meningkatkan mutu dan standar produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk IKM, dan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi termasuk penguasaan alat digital, dan strategi pemasaran digital modern.

Sasaran strategis kedua, Meningkatnya Omset Perdagangan, didukung oleh 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Namun demikian, dari keempat program yang dilaksanakan, terdapat 1 (satu) program yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, seluruh program yang dilaksanakan tetap memberikan kontribusi dan menunjang ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diukur dengan indikator Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen terhadap Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap toko modern, di mana sebanyak 16 unit toko modern telah memenuhi asas perlindungan konsumen dari total 20 unit yang diawasi. Ketercapaian ini didukung oleh laporan hasil pengawasan barang beredar yang dilaksanakan di toko modern di Kota Pasuruan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah

pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen dengan target sejumlah 16 pelaku usaha dan terealisasi sejumlah 16 pelaku usaha, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian tersebut didasarkan pada hasil pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap toko modern, yang menunjukkan bahwa sebagian toko modern telah memenuhi ketentuan terkait distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang efektif, kejelasan kriteria pemenuhan asas perlindungan konsumen, serta meningkatnya kepatuhan pengusaha sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 84,68% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan hasil pelaksanaan program dengan realisasi retribusi pasar mencapai Rp2.581.643.700 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.439.084.674, atau sebesar 84,68% terhadap target PAD Pasar sebesar Rp3.048.855.843. Ketercapaian target indikator didukung oleh partisipasi aktif dan sikap kooperatif pedagang dalam membayar retribusi sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 (dua) Kegiatan. Kegiatan pertama adalah Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pasar yang direvitalisasi. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi 50% sehingga capaiannya 100%. Capaian ini berdasarkan realisasi pasar yang telah direvitalisasi/rehabilitasi sebanyak 3 Pasar dari 6 Pasar yang dikelola yakni Pasar Gadingrejo, Pasar Kebonagung dan Pasar Besar. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya skala prioritas pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan pasar serta ketersediaan anggaran untuk proses pembangunan/pemeliharaan pasar guna menunjang pelayanan pasar yang layak dan prima. Selain itu, dukungan para stakeholder dan pedagang terdampak menjadi sisi positif kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan.

Kegiatan kedua yaitu Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaku perdagangan yang dibina. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 11,31% dan terealisasi 13,57% sehingga capaiannya 100%. Capaian ini berdasarkan data pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan pada tahun 2025 terdata sebanyak 90 orang PKL yang sudah terbina dari 663 orang total keseluruhan PKL yang ada Kota Pasuruan.

Ketercapaian target indikator didukung oleh partisipasi aktif dan turut serta para Pedagang Kaki Lima binaan dalam mematuhi regulasi dan ketentuan yang ada.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pelaksanaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diukur dengan satu indikator yaitu rata-rata Persentase Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 10% dan terealisasi 10,88% sehingga capaiannya sebesar 91,20%. Capaian ini berdasarkan data hasil monitoring kebutuhan pokok selama tahun 2025. Ketidaktercapaian target indikator disebabkan oleh adanya fluktuasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dinamika distribusi, kondisi pasokan dari daerah pemasok, serta peningkatan permintaan pada periode tertentu, yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah. Kami sebagai dinas yang membidangi perdagangan selalu bertugas memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan hanya dapat berusaha menekan harga bahan pokok dengan langkah - langkah tertentu yang sudah ditetapkan seperti pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10% dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 5,83%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan laporan harga bahan pokok yang diterbitkan setiap hari. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh pelaksanaan monitoring harga dan stok secara rutin, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta upaya pengendalian dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan satu indikator yaitu Persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang. Pada tahun 2025, ditargetkan sebesar 11% dan terealisasi 14,86% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data UTTP yang telah ditera/tera ulang pada tahun 2025 sebanyak 1913 Unit dibandingkan potensi alat UTTP secara keseluruhan sejumlah 12870. Ketercapaian target indikator didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), terutama Penera dan Pengawas kemetrologian UPT. Metrologi Legal, sudah mencukupi sehingga pelayanan tera dan tera ulang bisa lebih efektif dan hampir mencakup keseluruhan potensi alat UTTP baik di wilayah pasar rakyat, kelurahan, perusahaan, sentra perbelanjaan dan SPBU, tidak adanya penarikan retribusi dari pelayanan dimaksud (gratis) mulai Tahun 2024, pengawasan kemetrologian meliputi UTTP, BDKT

dan Satuan Ukuran (SU) mempunyai dampak kesadaran untuk pedagang atau pemilik timbangan menerakan alat UTTP-nya.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah laporan pelaksanaan Tera, Tera Ulang dengan target sejumlah 1 laporan dan terealisasi sejumlah 1 laporan, sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP yang telah dilaksanakan dan dilaporkan pada tahun berjalan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh adanya data potensi pedagang/pemilik alat UTTP di setiap pasar rakyat, kelurahan, pusat perbelanjaan, perusahaan, SPBU dan fasilitas kesehatan. Selain itu, adanya kantor baru yang mencakup hampir keseluruhan fasilitas metrologi legal, membawa dampak pelayanan yang prima. Data alat UTTP tersebut sangat membantu UPT. Metrologi Legal untuk melakukan pendataan dan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 per Program/Kegiatan dapat dirinci pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.703.524.524**	**8.350.683.168**	**95,95%**
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.458.800	8.819.037	93,24%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.667.188.124	7.429.115.023	96,89%
	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.397.400	8.274.000	98,53%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.046.400	100.362.340	93,76%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.953.900	4.900.000	98,91%

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.183.900	654.314.490	86,41%
2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**54.297.000**	**52.858.128**	**97,35%**
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.297.000	52.858.128	97,35%
3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**15.035.426.640**	**13.207.157.087**	**87,84%**
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11.170.561.940	9.510.804.114	85,14%
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.864.864.700	3.696.352.973	95,64%
4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**602.897.950**	**60.668.223**	**10,06%**
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota	602.897.950	60.668.223	10,06%
5	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**73.999.800**	**70.006.206**	**94,60%**
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	73.999.800	70.006.206	94,60%
6	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**699.559.691**	**354.051.720**	**50,61%**
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	699.559.691	354.051.720	50,61%

Sumber: Dokumen P1 Desember Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025

Secara umum, realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang relatif baik. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat penyerapan pada sebagian besar program.

Di sisi lain, terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang belum optimal. Realisasi anggaran terendah terdapat pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan capaian sebesar 10,06%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh belum dapat dilaksanakannya rencana aksi berupa kegiatan Pasar Murah yang direncanakan untuk mendukung stabilisasi harga pada periode Natal dan Tahun Baru (NATARU). Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu penetapan Peraturan Wali Kota sebagai dasar operasional, yang baru terbit pada akhir tahun anggaran. Sehingga waktu pelaksanaan dan penyerapan anggaran menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk direalisasikan sebelum batas akhir pencairan anggaran tahun berjalan.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mencatat realisasi sebesar 50,61%, yang dipengaruhi oleh belum terlaksananya sebagian rencana aksi pada subkegiatan terkait. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi pendukung pada tahap perencanaan awal serta perlunya penyesuaian waktu pelaksanaan, sehingga anggaran belum dapat diserap pada tahun berjalan. Mengingat sumber pendanaan berasal dari hibah DBH-CHT, pelaksanaan rencana aksi tersebut direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

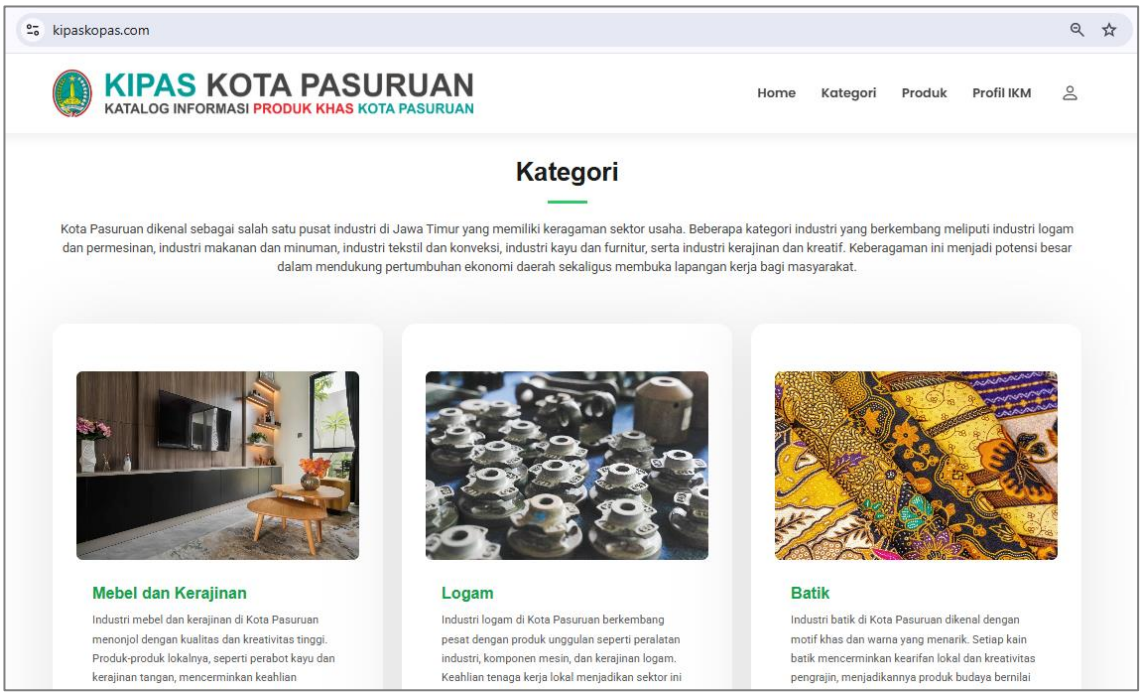
Secara keseluruhan, meskipun tingkat penyerapan anggaran pada beberapa program belum optimal, capaian kinerja utama tetap dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

3.3 Inovasi

Kipaskopas.com *(Katalog Informasi Produk Khas Kota Pasuruan)* merupakan inovasi digital yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pelayanan dan penguatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM). Inovasi ini disusun sebagai sarana promosi dan publikasi terpadu untuk memperkenalkan produk unggulan daerah, khususnya sektor mebel, logam, dan batik, kepada masyarakat luas. Kehadiran platform ini menjadi wujud komitmen perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital sektor industri serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Kipaskopas.com dirancang untuk menghimpun dan menyajikan informasi produk IKM dalam satu platform digital yang mudah diakses, informatif, dan representatif. Melalui sistem yang terintegrasi, katalog ini meningkatkan visibilitas produk serta memperkuat citra produk lokal Kota Pasuruan di pasar yang lebih luas. Selain itu, inovasi ini mendukung tata kelola data IKM yang lebih tertib dan terdokumentasi secara digital. Sebagai gambaran implementasi inovasi tersebut, berikut disajikan tangkapan layar

(screenshot) tampilan aplikasi Kipaskopas.com yang menampilkan katalog produk unggulan Kota Pasuruan secara digital dan terintegrasi.



Gambar 3.2 Screenshot katalog digital Kipaskopas.com

Tujuan utama pengembangan Kipaskopas.com adalah memperluas jangkauan pemasaran produk IKM melalui media digital yang efektif dan efisien. Platform ini menyediakan informasi produk yang lengkap, terstandar, dan mudah diakses sehingga memudahkan calon pembeli, mitra usaha, maupun investor dalam mengenal produk unggulan daerah. Dengan tersedianya informasi yang sistematis dan transparan, inovasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing IKM serta memperkuat posisi produk lokal dalam persaingan pasar. Di samping itu, keberadaan katalog digital ini mendukung program pemerintah daerah dalam penguatan sektor industri kecil dan menengah, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan.

Dari sisi manfaat, Kipaskopas.com memberikan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pelaku IKM, platform ini menjadi media promosi digital yang mampu meningkatkan peluang akses pasar, memperluas jejaring usaha, dan mendorong peningkatan volume penjualan. Bagi Pemerintah Daerah, inovasi ini berfungsi sebagai instrumen pendataan, pembinaan, serta penguatan branding produk unggulan Kota Pasuruan secara terstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi masyarakat dan konsumen, katalog ini mempermudah akses terhadap informasi produk berkualitas, menumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal, serta mendorong penggunaan dan pelestarian produk khas daerah.

Secara keseluruhan, Kipaskopas.com diharapkan menjadi pusat informasi dan promosi digital yang berkelanjutan bagi produk mebel, logam, dan batik Kota Pasuruan.

Keberadaannya tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat citra Kota Pasuruan sebagai daerah dengan produk industri kreatif dan manufaktur unggulan. Dengan pengelolaan yang konsisten dan berkesinambungan, inovasi ini menjadi fondasi dalam pengembangan ekosistem digital IKM yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tingkat tujuan, yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Nilai PDRB Sektor Perdagangan telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan perkembangan kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan sebagai sektor unggulan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang terkait dengan pelaksanaan program pemerintah daerah maupun faktor eksternal lainnya.

Pada tingkat sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian dan Meningkatnya Omset Perdagangan, masing-masing indikator telah mencapai target kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan, khususnya dalam mendukung pengembangan sektor industri dan perdagangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, antara lain fluktuasi harga kebutuhan pokok, keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung aktivitas perdagangan. Selain itu, penggunaan indikator makro seperti PDRB juga dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali langsung perangkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan bahwa target kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan akuntabel, serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kinerja pembangunan daerah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun 2025 dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Kota Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyatakan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan pada tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tindak lanjut tersebut meliputi penyempurnaan dokumen perencanaan, penguatan keterkaitan antara indikator dan program, serta peningkatan kualitas penyajian data kinerja.

Sebagai langkah penguatan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, serta untuk memastikan keberlanjutan perbaikan tata kelola kinerja, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap perubahan target kinerja dalam dokumen perencanaan (Renja) didukung oleh analisis dan argumentasi yang memadai guna memastikan akuntabilitas perencanaan.
2. Melakukan penyempurnaan dokumen cascading perangkat daerah secara menyeluruh, mulai dari level Kepala Daerah (Visi dan Misi) hingga level individu (SKP Pegawai Pelaksana).
3. Mengembangkan sistem pengelolaan data kinerja yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung akurasi pengukuran indikator serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan pada tahun mendatang semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,10
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	1,00

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.653.421.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	27.837.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	11.968.945.960,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	121.174.950,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	107.862.900,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	804.757.651,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**21.684.000.420,00**	

Pasuruan, 2 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,10		0,10			
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,00		1,00			
CAPAIAN OUTPUT																															
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																															

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.653.421.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	27.837.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	11.968.945.960,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	121.174.950,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	107.862.900,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	804.757.651,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**21.684.000.420,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 24 April 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ADI WIBOWO	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,10%	0,10%
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	Persentase Peningkatan Omset	1,00%	1,00%

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.653.421.959,00	Rp	8.506.850.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	27.837.000,00	Rp	8.697.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	11.968.945.960,00	Rp	13.363.504.500,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	121.174.950,00	Rp	112.298.250,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	107.862.900,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	804.757.651,00	Rp	697.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**21.684.000.420,00**	**Rp**	**22.762.910.200,00**	

Pasuruan, 24 April 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																										%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,10		0,10		
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,00		1,00		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.653.421.959,00	Rp	8.506.850.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	27.837.000,00	Rp	8.697.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	11.968.945.960,00	Rp	13.363.504.500,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	121.174.950,00	Rp	112.298.250,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	107.862.900,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	804.757.651,00	Rp	697.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**21.684.000.420,00**	**Rp**	**22.762.910.200,00**	

Pasuruan, 24 April 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 3 September 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ADI WIBOWO	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,10%	0,15%
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Omset	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	1,00%	0,01%

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.506.850.959,00	Rp	8.506.850.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	8.697.000,00	Rp	8.697.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	13.363.504.500	Rp	13.363.504.500	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	112.298.250,00	Rp	112.298.250,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	73.999.800,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	697.559.691,00	Rp	697.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**22.762.910.200,00**	**Rp**	**22.762.910.200,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 3 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																										%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,15		0,15		
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,01		0,01		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.506.850.959,00	Rp	8.506.850.959,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	8.697.000,00	Rp	8.697.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	13.363.504.500	Rp	13.363.504.500	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	112.298.250,00	Rp	112.298.250,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	73.999.800,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	697.559.691,00	Rp	697.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**22.762.910.200,00**	**Rp**	**22.762.910.200,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 3 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua, WALI KOTA	Pihak Pertama, Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ADI WIBOWO	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,15%	0,15%
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	0,01%	0,01%

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.506.850.959,00	Rp	8.703.524.524,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	8.697.000,00	Rp	54.297.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	13.363.504.500,00	Rp	15.035.426.640,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	112.298.250,00	Rp	602.897.950,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	73.999.800,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	697.559.691,00	Rp	699.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**22.762.910.200,00**	**Rp**	**25.169.705.605,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 18 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP	:	197012231990031001
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA UTAMA MUDA / IV-C
JABATAN / KELAS JABATAN	:	Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																										%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,15		0,15		
2	Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,01		0,01		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	8.506.850.959,00	Rp	8.703.524.524,00	DAU
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp	8.697.000,00	Rp	54.297.000,00	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	13.363.504.500,00	Rp	15.035.426.640,00	DAU dan BKK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	112.298.250,00	Rp	602.897.950,00	DAU
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	73.999.800,00	Rp	73.999.800,00	DAU
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	697.559.691,00	Rp	699.559.691,00	DAU dan DBH-CHT
JUMLAH		**Rp**	**22.762.910.200,00**	**Rp**	**25.169.705.605,00**	

Pasuruan, 18 September 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

HERY DWI SUJATMIKO, S.SOS, MM
NIP. 197012231990031001

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PASURUAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3.30.3.31.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1350	1400	1450	1500	1550	1600	
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
		Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri (%)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
		Meningkatnya omset perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan (%)	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

KERTAS KERJA VERIFIKASI
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sumber Referensi	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulatif/ Non Kumulatif	Periode Data
1	Tujuan: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	RPJMD	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam Milyar)	Rupiah	perhitungan oleh BPS	BPS	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan	RPJMD	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam Milyar)	Rupiah	perhitungan oleh BPS	BPS	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
2	Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Perindustrian	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Renstra	Selisih Nilai produksi IKM pada tahun berjalan dibandingkan dengan nilai produksi IKM tahun sebelumnya berdasarkan data SIINas (Sektor Industri Unggulan)	Persen	$\frac{(\sum \text{Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Th(n)} - \sum \text{Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Th(n-1)})}{\sum \text{Nilai Produksi Sektor Industri Unggulan Th(n-1)}} x100\%$	Bidang Perindustrian	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
3	Sasaran 2: Meningkatnya Omset Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Omset Penjualan	Renstra	Selisih Omset penjualan produk dari IKM sektor unggulan yang dibina pada tahun n dibandingkan dengan Omset pada tahun sebelumnya	Persen	$\frac{(\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan yg dibina Th(n)} - \sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan yg dibina Th(n-1)})}{\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan yg dibina Th(n-1)}} x100\%$	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	RPJMD	Jumlah pedagang /produsen yang patuh terhadap perlindungan konsumen (sesuai kriteria pengawasan) dibagi jumlah pedagang/produsen yg diawasi	Persen	$\frac{jumlah\ kepatuhan\ pedagang\ atau\ produsen\ terhadap\ perlindungan\ konsumen\ tahun\ n}{jumlah\ pedagang\ atau\ produsen\ yang\ diawasi\ tahun\ n} x100\%$	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
5	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	Renstra	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	Unit Usaha	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang layak	RPJMD	Jumlah unit sarpras distribusi perdagangan layak (dari segi bangunan, penggunaannya) dibagi seluruh unit sarpras distribusi perdagangan	Persen	$\frac{Jumlah\ sarpras\ distribusi\ perdagangan\ yang\ layak\ tahun\ n}{Jumlah\ seluruh\ sarpras\ distribusi\ perdagangan\ tahun\ n} x100\%$	Bidang Pengelolaan Pasar	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
7	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	Renstra	jumlah Pasar Yang Direvitalisasi dibagi jumlah total pasar	Persen	$\frac{Jumlah\ pasar\ yang\ direvitalisasi\ tahun\ n}{Jumlah\ total\ pasar\ tahun\ n} x100\%$	Bidang Pengelolaan Pasar	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
8	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Renstra	Rasio jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina terhadap jumlah seluruh pengelola sarana distribusi perdagangan	Persen	$\frac{Jumlah\ pengelola\ pasar\ yang\ dibina\ tahun\ n}{Jumlah\ seluruh\ pengelola\ pasar\ tahun\ n} x100\%$	Bidang Pengelolaan Pasar	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Triwulan
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks Perkembangan Harga	RPJMD	Indeks Perkembangan Harga	Persen	perhitungan oleh BPS	BPS		Bulanan

No	Nama Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sumber Referensi	Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Kumulatif/ Non Kumulatif	Periode Data
10	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	Renstra	Jumlah Jenis Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau harganya	Jenis	Jumlah Jenis Bahan Pokok dan Barang Penting yang dipantau harganya	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Bulanan
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Kepatuhan Pedagang/pelaku usaha terhadap tertib niaga	RPJMD	Jumlah pedagang/pelaku usaha yang tertib niaga dibagi jumlah pedagang/pelaku usaha yg dilakukan pengawasan	Persen	$\frac{jumlah\ pedagang\ atau\ pelaku\ usaha\ yang\ tertib\ niaga\ tahun\ n}{jumlah\ pedagang\ atau\ pelaku\ usaha\ yang\ dilakukan\ pengawasan\ tahun\ n} x100\%$	UPTD. Metrologi Legal	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
12	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah di Tera dan Tera Ulang	Renstra	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang telah di-Tera dan Tera Ulang dibagi potensi tera	Persen	$\frac{Jumlah\ alat\ UTTP\ yang\ telah\ ditera\ dan\ tera\ ulang\ tahun\ n}{Data\ potensi\ tera\ \ tahun\ n} x100\%$	UPTD. Metrologi Legal	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Triwulan
13	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	RPJMD	Jumlah IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran dibagi jumlah IKM dibina	Persen	$\frac{Jumlah\ IKM\ yang\ mengalami\ peningkatan\ pemasaran\ tahun\ n}{Jumlah\ IKM\ yang\ dibina\ tahun\ n} x100\%$	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
14	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dipromosikan	Renstra	Jumlah IKM yang dibina dan dipromosikan melalui pameran serta media pendukung dibagi jumlah IKM dibina	Persen	$\frac{Jumlah\ IKM\ yang\ dipromosikan\ melalui\ pameran\ dan\ media\ pendukung\ tahun\ n}{Jumlah\ IKM\ yang\ dibina\ tahun\ n} x100$	Bidang Perdagangan	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	RPJMD	Selisih Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi produk maupun SDM tahun N dikurang Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi produk maupun SDM tahun N-1 dibagi Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi produk maupun SDM N-1	Persen	$\frac{(\sum \text{IKM yang Berkembang Th}(n) - \sum \text{IKM yang Berkembang Th}(n-1))}{\sum \text{IKM yang Berkembang Th}(n-1)} \text{x100\%}$	Bidang Perindustrian	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan
16	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	Renstra	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi produk maupun SDM dibagi Jumlah IKM yang dibina	Persen	$\frac{Jumlah\ IKM\ yang\ mendapatkan\ sertifikasi\ produk\ maupun\ SDM\ tahun\ n}{Jumlah\ IKM\ yang\ dibina\ tahun\ n} x100\ \%$	Bidang Perindustrian	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Tahunan